

Rabu, 6 April 2011

Periksa UJ dan Zulfadhli Tunggu Izin Presiden

■ Dugaan Korupsi Dana Bansos Provinsi Kalbar

Pontianak, BERKAT.

Polda Kalbar layangkan surat izin ke Presiden guna pemeriksaan dua saksi pimpinan cabang olahraga ketika dana Bansos dialirkan. Pasaunya, kedua

saksi kini berstatus pejabat negara sebagai anggota legislatif di Senayan. Maka pemeriksaan terhadap keduanya membutuhkan izin kepala negara, untuk dimintai keterangan dalam pengusutan dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Kalbar.

"Kita sudah mengirim surat izin kepada Presiden untuk pemeriksaan dua saksi. Saksi yang diperiksa merupakan bagian dari 33 pengurus Cabang olahraga. Tapi pengirimannya melalui Mabes Polri setelah gelar

LANJUTAN BACA HAL 11

Periksa UJ dan Zulfadhli Tunggu Izindari Hal 1

perkara. Kini Polda sedang menunggu undangan Mabes buat ekspoze gelar perkara," ujar Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW, Selasa (5/4).

Namun identitas maupun inisial saksi enggan diutarakan Suhadi yang pemeriksaannya masih menunggu surat izin Presiden. Apabila kedua saksi pengurus cabang olahraga, maka mereka yakni Mantan Gubernur Kalbar atau mantan ketua KONI, Usman Ja'far akrab disapa UJ yang terpilih sebagai anggota DPR-RI priode 2009-2014 Dapil Kalbar. Serta saksi lainnya, Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar Zulfadhli yang kini masih mengemban jabatan sebagai ketua Pengda PSSI Kalbar. Ia juga terpilih pada pemilu legislatif 2009 untuk duduk di Senayan.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi," jelas Suhadi.

Menurut Suhadi, surat izin ke Presiden dilayangkan Polda Kalbar ke Mabes Polri dua pekan lalu. Serta tim penyidik sedang menunggu panggilan untuk ekspoze kasus di Mabes. Ekspoze tidak sebatas dihadiri internal jajaran kepolisian. Melainkan Kejaksaan Agung, Kemendagri dan KPK. "Kalau ekspoze gelar perkara sudah, maka surat dari Polda akan diteruskan Mabes ke Presiden," tuturnya.

Tetapi Suhadi tidak merinci jadwal ekspoze penyidik Polda di Mabes Polri. Hanya menyampaikan ekspoze tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat. "Yang pasti secepatnya," tegasnya.

Dalam perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bansos jumlah tersangka tetap belum bertambah. Masih satu tersangka yang ditetapkan Polda Kalbar. Yakni mantan wakil bendahara KONI, Iswanto.

Mencuatnya kasus Bansos bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Lapor-

an Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Praon sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar. (del)